

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	RAKYAT MERDEKA	13	26-8-2002

ADILI MAFIA PASIR LEWAT PENGADILAN AD HOC

Jakarta, Rakyat Merdeka

Kasus penyelundupan pasir laut dari Riau ke Singapura, sepertinya tidak pernah selesai. Tertangkapnya tujuh kapal keruk berbendera asing di perairan Riau, membuktikan bahwa aksi penyelundupan itu terus marak. Ironisnya, pemerintah seolah tidak berdaya. Kalaupun DPR pun geregetan sehingga muncul usulan pengadilan Ad Hoc bagi para mafia pasir laut.

Demikian dituturkan anggota Komisi V DPR dari F-Reformasi Afni Achmad kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pengadilan sistem Ad Hoc dinilai lebih efektif untuk mengeliminir aksi penyelundupan pasir laut di wilayah Riau. "Sebaiknya, penyelundup pasir yang

menggunakan 7 kapal keruk pasir laut diadili lewat pengadilan adhoc saja," tukasnya. Dikatakan, hasil operasi ke-tujuh kapal keruk berbendera asing itu, diduga kuat dilempar ke Singapura untuk perluasan (reklamasi). Kasus ini meledak karena disinyalir melibatkan kongsi penguasa dan pengusaha beken. "Saya mengusulkan itu karena kita dalam kondisi krisis. Saya melihat Pengadilan Ad Hoc jawaban yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini," tukasnya lagi.

Pendapat senada dikemukakan anggota Komisi V DPR dari F-PDIP Karimun Usman. Menurutnya, penyelundup pasir laut harus dihukum seberat-beratnya. Soal apakah lewat pengadilan Ad Hoc, yang penting ada kepastian hukum. "Apakah harus Ad Hoc atau enggak, bukan substansi.

Yang penting, proses hukumnya harus tegas. Ganjar hukuman berat bagi penyelundup pasir itu," tukasnya.

Realitasnya, lanjut Karimun, aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani kasus ini. Sangat berbeda bila menangani kasus penyelundupan, seperti ganja barang-barang elektrobik, mobil mewah. "Misalnya, ganja selundupan di bakar. Seharusnya, ke tujuh kapal ini diurus tuntas. Kalau ditemukan pelanggaran hukum, dibakar juga dong. Kita akan lihat, bagaimana keseriusan aparat dalam menangani kasus penyelundupan pasir laut Riau," tukasnya.

Dikatakan, maraknya penyelundupan pasir laut tak lepas dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Bahkan dugaan Karimun, penyelundupan pasir ke Singapura meli-

batkan banyak pejabat Pemda Riau dan anggota parlemen Singapura. "Saya punya data adanya perjanjian antara Pemda Riau dengan anggota parlemen Singapura. Dalam perjanjian tersebut, pihak Singapura diberi wewenang untuk mengawasi pengiriman pasir dari Riau ke Singapura. Ini kan gila," jelasnya.

Dikatakan, masalah ini pernah disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V dan Menperindag Rini Soewandi, beberapa waktu lalu. Saat itu, Rini hanya bisa terbengong-bengong ketika dipaparkan data tersebut. "Saat itu, menperindag hanya bisa melongo saja. Saya jadi heran, apa saja yang dikerjakannya. Masalah ini kok belum tahu," tukasnya.(IP)

44